

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SISWA SMPT DIPONOGORO SUBANG

Sutangsa  
Dosen Tetap Program Pascasarjana Universitas Subang  
[sutangsapls@gmail.com](mailto:sutangsapls@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada fenomena pengelolaan guru yang belum efektif, antara lain yang menonjol adalah dalam hal perencanaan, penempatan guru, dan peningkatan kesejahteraan guru. Dalam kegiatan perencanaan, belum dibuat perencanaan penerimaan dan seleksi, perencanaan induksi, perencanaan kompensasi, perencanaan penilaian, perencanaan pengembangan. Dalam kegiatan penempatan guru yang diluar bidang studi keahliannya, pengembangan guru dan kurang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan beberapa teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah karena pengamatan ini dilakukan terhadap perilaku manusia yang berinteraksi dalam proses pengelolaan administrasi guru, mulai dari pelaksanaan fungsi perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Dengan pendekatan ini pula penulis/peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian dan terlibat dalam proses pengelolaan, sehingga memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari sumber utama, baik dari bagian kepegawaian beserta instansi terkait sebagai pengelola maupun dari pada guru sebagai pegawai yang dikelola.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil tenaga guru di SMPT Diponegoro belum menggambarkan keadaan yang kondusif bagi peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan guru di SMPT Diponegoro belum sepenuhnya memenuhi kriteria efektivitas fungsi-fungsi pengelolaan guru.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan mutu guru

## ABSTRACT

*This research is based on the phenomenon of ineffective teacher management, among which the prominent are in terms of planning, teacher placement, and improving teacher welfare. In planning activities, no planning for acceptance and selection, induction planning, compensation planning, appraisal planning, development planning has been made. In teacher placement activities outside the field of study of expertise, teacher development does not refer to improving the quality of education in schools.*

*This study uses a qualitative research approach, with several data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation studies. The reason for using a qualitative approach is because this observation is carried out on human behaviour that interacts in the teacher administration management process, starting from the implementation of the planning function to termination of employment. With this approach, the writer/researcher acts as the main instrument of research and is involved in the management process, so as to obtain the necessary data and information from the*

*main sources, both from the personnel department and related agencies as managers and from teachers as managed employees.*

*The results showed that the profile of teachers at SMPT Diponegoro did not describe conditions conducive to improving the quality of education. Meanwhile, the implementation of teacher management at SMPT Diponegoro has not fully met the criteria for the effectiveness of teacher management functions.*

*Keywords: policy implementation, quality management of teachers*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Sebuah peraturan Tertuang dalam PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani. Pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan public atau mengelola program atau asset publik, pada prinsipnya administrasi dalam dunia pendidikan merupakan aplikasi ilmu administrasi ke dalam lapangan pendidikan, prinsip tersebut sering disebut sebagai bagian dari “*applied sciences*” arti dan nilai administrasi Pendidikan maupun fungsi-fungsinya adalah juga merupakan rangkaian konsep dari rumusan administrasi publik dan manajemen pada umumnya, hanya saja khusus karena mempunyai perbedaan objek dan tujuan spesifikasinya, sementara fungsi dan strateginya managerial yang digunakan pada hakekatnya sama dengan apa yang diterapkan dalam lapangan manajemen pada umumnya. Diakui bahwa proses administrasi itu tidak selamanya berjalan lancar karena adanya berbagai hambatan dan tantangan baik dari segala fasilitas maupun kemampuan personil dalam

melaksanakan proses administrasi tersebut.

Menurut UU nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 1 (tentang system pendidikan nasional) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat terlaksana tanpa pemberian kesempatan sebesar-besarnya pada sekolah yang merupakan ujung tombak terdepan untuk terlibat aktif secara mandiri mengambil keputusan tentang Pendidikan

Pengelolaan administrasi di sekolah atau madrasah terhadap tugas pokok organisasi dapat bersifat pelayanan, menyajikan bahan keterangan atau dokumentasi dan sebagai pusat ingatan. Permendikbud No 15 Tahun 2020 Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, Pasal 4 ayat (2) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan(RPL)/Rencana Pelaksanaan Bimbingan(RPB).

Dengan adanya sistem pengadministrasian yang baik dapat mencerminkan kemajuan organisasi dan akan dapat memberikan pelayanan yang baik dalam memenuhi keperluan-

keperluan dalam mengembangkan organisasi, maju mundurnya suatu organisasi atau madrasah sebagai lembaga pendidikan sangat tergantung dari kemampuan personil administasinya. Mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional. Pendidikan yang bermutu hanya muncul pada sekolah yang bermutu dan sekolah yang bermutu hanya ada jika dikelola guru-guru yang bermutu. Tantangan ke depan bagaimana kita bersama secara simultan dan sinergis membangun dan mendorong pemerintah, masyarakat, penyelenggara sekolah, dan guru itu sendiri agar memiliki komitmen dan keberpihakan dalam mewujudkan guruguru yang bermutu

SMPT Diponegoro Subang merupakan Lembaga yang dibawah payung hukum Yayasan Pendidikan Nurul Quran, Yayasan ini meliputi beberapa Lembaga yang dikelolahnya diantaranya Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, SDT Diponegoro, SMPT Diponegoro, SMKT Diponegoro dengan jurusan rekayasa perangkat lunak (RPL), kebanyakan siswa dari berbagai daerah diluar kota subang, dari Indramayu, Purwakarta, Karawang, Jakarta, Bandung Sumatra dan Kalimantan. Hal ini menjadi menarik perhatian penulis untuk lebih mengetahui sejauh mana dalam melaksanakan administrasi guru yang tertuang dalam Permendikbud No. 15 Tahun 2020 pasal 4 ayat 2.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis memilih fokus penelitian ini pada masalah yang terjadi di Lembaga Pendidikan tersebut sebagai mana rumusan masalah berikut "Bagaimana implementasi kebijakan

Peraturan Mentri Pendidikan No.15 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan tentang RPP,RPB,RPL di SMPT Diponegoro?

## KAJIAN PUSTAKA

Secara konseptual, implementasi sebuah kegiatan atau program yang tertuang dalam kebijakan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan. Selain itu, implementasi merupakan tahapan pada tataran pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah disepakati oleh semua pihak (Bastaman, 2020; Hirawan, 2019; Hirawan et al., 2018; Peirisal, 2015)

Tindakan ini berusaha untuk mentransformasikan apa yang tertulis atau tertuang dalam keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai hasil yang diinginkan, baik itu berupa sejumlah perubahan-perubahan besar atau kecil sebagai mana yang telah di putuskan sebelumnya. Intinya adalah pencapaian sebuah tujuan. Tujuan tersebut bisa saja berupa tujuan antara atau tujuan yang sebenarnya, tergantung dari sudut pandang dimana ia maknai. Dari tujuan di maksud, kemudian sebuah kegiatan implementasi dinilai apakah ia masuk kategori baik, sedang atau bahkan gagal mencapai tujuannya.

Dalam kaitan ini, Nograho (2008:423) berpendapat bahwa: implemetlasi kebijakan pada perinsip nya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Oleh sebab itu, untuk mengimpelmentasikan nya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan. Juga, van meter and van Horn (974:447-448) yang menyatakan bahwa:

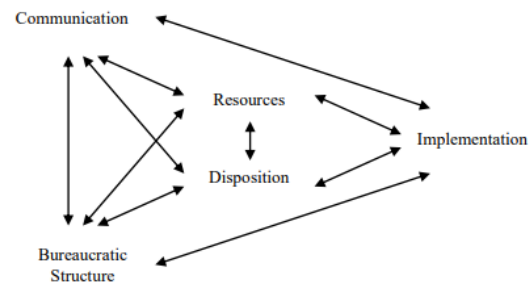
*Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision.* (Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu umum atau pribadi (atau kelompok) yang diharapkan pada pencapaian tujuan yang di tetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya).

Dalam prespektif ini, bagi pelaksanaannya, implementasi kegiatan atau pogram harus dipahami dan kemudian di nilai dari hasil yang di raih setelah sebuah Program atau kebijakan itu di laksanakan. Pemahaman tersebut tidak berhenti setelah pelaksanaan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan, tetapi harus berlanjut hingga dicapainya sebuah tujuan yang ditetapkan. Juga perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial atau yang sering disebut lingkungan kebijakan. Dengan pemahaman demi kian, semua beban tanggung jawab tidak semata-mata bertumpu pada aparat pelaksana yang notabene adalah salah satu unsur pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan (*policy implementasi*) merupakan tahap pelaksanaan dari desain kebijakan yang telah di rumuskan (*police pormulation*). Dalam proses pelaksanaan itu di perlukan dalam aktivitas termasuk penyimpanan ,pelaksanaan, sosialisasi, peningkatan kepastian (*capacity building*) dari pihak pelaksanaan terutama (aparatur pemerintah). Berbagai tahap sebelum pelaksanaan merupakan hal penting sebelum, bahkan selama implementasi. Jadi implementasi kebijakan adalah

sebuah peroses yang rumit atau kompleks dengan melibatkan berbagai aktivitas dan kegiatan serta berbagai macam pemangku kepentingan.

Menurut Edwards III (1980: 9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.



## METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tektik pengumpulan data dilakukan secara gabungan dengan analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi “Selanjutnya, sugiyono (2012:1) mengatakan bahwa “metode penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting)”. Senada dengan pendapat tersebut Bogdan dan Tailor (Moleong, 2014:4) mendefinikan bahwa “metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamai”.

Sugiyono (2012:2-3) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen nya adalah peneliti itu sendiri, sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bakat teori dan

wawasan yang luas, agar mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1) Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan terkait dengan ketatausahaan tentang administrasi sekolah dengan cara pendataan, sosialisasi melalui media komunikasi dan melalui surat. Selain itu, disampaikan juga melalui rapat koordinasi dengan dewan guru dan semua staf terkait seperti koordisnasi dengan bidang kurikulum, kesiswaan ketatausahaan, keuanan bidang sarana, begitu juga rapat wali murid beserta komite sekolah, pihak perwakilan dari pondok pesantren nurul anwar muftadiin sebagai tempat kegiatan menuntut ilmu agama ketika selesai pembelajaran di SMPT Diponegoro dan intansi lainnya yang terkait. Untuk lebih memperluas bahwa pentingnya aministrasi guru untuk menunjang keberhasilan mutu siswa dalam pembelajaran sesuai dengan target bahan ajar dan waktu maka jaringan komunikasi kita lakukan melalui turba yaitu sosialiasa ke kelas kelas agar siswa mengetahui tentang administrasi yang berhubungan dengan siswa diantaranya kita menanyakan tentang absen keaktifan siswa, jadwal piket, struktur organisasi kelas, inventaris kelas, denah duduk siswa, dan lain sebgainya. Selain itu, kita berbincang dengan pihak guru mengenai bahan ajar dan perangkat lainnya seperti buku agenda kelas, RPP, Silabus, dan buku penunjang lainnya diantaranya buku paket, modul dan lain sebagainya.

Bidang kurikulum telang menginformasikan mengenai tupoksi sebagai kurikulum yang merupakan jantung sekolah. Glass menjelaskan mengapa kurikulum dibutuhkan untuk setiap tahun ajaran sekolah, yakni: (1) Menyediakan gambaran besar untuk satu tahun ajaran sekolah; (2) Mengesahkan pengajaran yang standar dan akuntabel, untuk digunakan sebagai petunjuk; (3) Mengidentifikasi kemampuan dan konsep yang ditetapkan dalam standar dan keahlian mengarahkan pertanyaan; (4) Referensi mencapai unit penilaian; (5) Menyediakan daftar dari sumber-sumber dan material yang ada secara keseluruhan; (5) Memberi dukungan dan konsistensi di setiap tingkatan dan menguatkan team work; (6) Mempromosikan artikulasi dari tingkatan ke tingkatan berikutnya; (7) Bertindak sebagai pemasaran dan alat komunikasi.

Bidang tata usaha sekolah Tata usaha sekolah adalah bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah. Informasi yang tata usaha sekolah kelola penting sebagai basis pelayanan dan bahan pengambilan keputusan sekolah. Semakin lengkap dan akurat data terhimpun maka pemberian pelayanan makin mudah dan pengambilan keputusan makin tepat. Menurut Koordinator tata usaha SMPT Diponegoro mengungkapkan mengenai tatausaha yang dilaksanakan dan diterapkan saat ini yang mengacu pada teori sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan akan tetapi masih ada kekurangan dan perlunya profesionalisme.

Bidang kesiswaan SMPT Diponegoro Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, materi kegiatan kesiswaan meliputi:

- a) Pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME;
- b) Pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia; Melaksanakan apel pagi dan sore, upacara pengibaran bendera setiap hari senin, pendidikan dasar bela negara, upacara pengibaran bendera hari-hari bersejarah nasional, sosialisasi peraturan dan tata tertib siswa di sekolah dan asrama, dan regenerasi kepemimpinan siswa.
- c) Pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara; Melaksanakan kegiatan bela Negara setiap sabtu dengan pola pembinaan PBB serta ceramah umum tentang Bela Negara setiap 3 bulan sekali, pramuka dan kepramukaan wajib bagi seluruh siswa, partisipasi kegiatan hari besar nasional dan lomba-lomba, bersama-sama sebid 2 melaksanakan kegiatan rutin seperti apel pagi dan sore, upacara pengibaran bendera setiap hari senin, pendidikan dasar bela negara, upacara pengibaran bendera hari-hari bersejarah nasional, serta sosialisasi peraturan dan tata tertib siswa di sekolah dan asrama.
- d) Pembinaan prestasi akademik, seni, olahraga sesuai dengan minat dan bakat; pelatihan seni hadroh, pidato, futsal, bola voli.
- e) Pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural; hal ini biasa ada kunjungan dari pihak pemerintah setempat mengenai bela negara yang dibimbing oleh kodim Subang
- f) Pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan; melalui pelajaran prakarya siswa diberikan materi bercocok tanam dan hasilnya di manfaatkan oleh anak santri setempat
- g) Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
- h) Pembinaan sastra dan budaya; kegiatan ini belum terealisasi
- i) Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); bekerjasama dengan pihak lembaga yang masih satu naungan Yayasan Pendidikan Nurul Quran.

## 2) Sumber Daya

Manusia merupakan sumberdaya terpenting untuk menentukan suatu proses implementasi kebijakan. Apabila sumberdaya manusia dalam sebuah organisasi kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, maka kegiatan organisasi tidak berjalan secara optimal. Disisi lain, sumberdaya manusia juga harus memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara optimal. Petikan wawancara dengan kepala sekolah SMPT Diponegoro dan bidang data dan kependidikan yang dibawah naungan yayasan pendidikan Nurul Quran Subang sebagai berikut:

“Pegawai yang ada di lingkup SMPT Diponegoro Subang yang bekerja sebagai administrasi dan tenaga kependidikan sebanyak 4 orang dan guru tetap yayasan dan guru tidak tetap sebanyak 18 orang secara teknis dilihat dari segi jumlah cukup memadai, sementara dari kemampuan sudah cukup memadai, kemudian tingkat kepatuhan pada dasarnya belum patuh dalam menjalankan perintah dikarenakan masih banyak guru yang bercabang disekolah lain dan sebagian mempunyai usaha lain selain mengajar guna untuk mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan upah dari sekolah dibawah gaji minimum UMR .”

Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMPT Diponegoro Subang yang linier sebanyak 8 orang dan yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi sebanyak 5 orang selebihnya 13 orang sebagai guru honorer dengan upah kurang dari cukup. Hal ini masih jauh dari harapan untuk mendapatkan mutu pendidikan yang berstandar yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Memang pada kenyataannya, tidak semua guru menikmati seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa guru mungkin masih belum mendapatkan gaji dan tunjangan seperti yang mereka harapkan. Hasil wawancara awal di Sekolah Menengah Pertama SMPT Diponegoro Subang merupakan sekolah menengah pertama yang terbilang masih baru, pembukaan sekolah tersebut dimulai pada tahun 2013. Salah satu guru menyebutkan bahwa masih mengandalkan gaji yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Anggaran merupakan sumberdaya yang tidak kalah pentingnya dengan manusia ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran belum tersedia akan menjadikan hambatan untuk merealisasikan apa yang akan dicapai oleh kebijakan tersebut. Anggaran yang tersedia ini belum termasuk membiayai kegiatan pendampingan, pengawasan dan pengendalian terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah. Sebab itu dari faktor finansial diperlukan adanya penambahan termasuk anggaran penanganan yang bersifat insidental.

### **3) Disposisi**

Secara umum staf pelaksana dalam menjalankan perintah atau sikap melayani terhadap penanganan administrasi, terbukti setiap mendapatkan perintah dari pimpinan pelaksana tersebut dengan cepat tanggap

dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsinya, termasuk mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya yang berkenaan dengan administrasi sekolah, sehingga yang berkaitan dengan sikap pelaksana tidak menjadi hambatan terhadap pelaksanaan tugas berkaitan penanganan administrasi.

### **4) Struktur Birokrasi**

Pada aspek struktur birokrasi sudah menunjukkan adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta pembagian kewenangan terbukti dari struktur organisasi sekolah SMPT Diponegoro Kabupaten Subang tidak semua bidang menjalankan tugas dan fungsi administrasi tetapi sudah diatur sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing bidang tupoksinya artinya dalam struktur organisasi sekolah tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, dalam pelaksanaan tugas di lapangan koordinasi antara bidang saling berkaitan dan terintegrasi tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam pelaksanaan secara operasional masing-masing bidang dapat meminta bantuan manakala diperlukan hubungan kerjasama, atau koordinasi ini bukan hanya dilingkup bidang masing masing saja akan tetapi dapat bekerjasama dengan bidang lain atau lembaga lain yang dibawah naungan perkumpulan kepala sekolah swasta. Untuk menjalankan tugas fungsi secara oprasional lebih detailnya diatur dengan setandar Oprasional prosedur (SOP) sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas sehingga terhindar dari kesalahan, sehingga langkah-langkah penanganan masalah administrasi sekolah dapat dilaksanakan secara optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti di lapangan yang dilakukan peneliti di lapangan, diketahui bahwa gambaran secara umum pelaksanaan administrasi guru di SMPT Diponegoro sudah berjalan dengan baik walaupun masih belum sempurna namun tindakan untuk menyempurnakan hal tersebut terus dilakukan pihak sekolah yang senantiasa memberikan perhatian terhadap administrasi guru, agar lembaga ini agar dapat melaksanakan administrasi guru sesuai dengan porsinya masing-masing.

Penempatan guru pada bidangnya merupakan kendala yang masih ada di SMPT Diponegoro walaupun itu dilakukan karena tidak semua guru yang benar-benar punya jurusan yang sama dengan yang diajarkannya dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan anak didik, karena mau tak mau penempatan guru sesuai dengan bidang keilmuannya harus selalu di jadikan prioritas untuk dilaksanakan. Upaya peningkatan mutu pendidikan di SMPT Diponegoro cukup mendapat respon/tanggapan yang positif dari guru maupun pegawai TU, meskipun disana sini ada pro dan kontra baik secara terus terang maupun secara diam-diam. Baik yang antusias menerima, mereka ingin segera memperoleh kepastian, ingin memperoleh pedoman, petunjuk dan sebagainya, bahkan menuntut adanya definisi/batasan pengertian yang pasti. Disisi lain, ada yang pesimis terhadap upaya pelaksanaan administrasi guru.

## DAFTAR PUSTAKA

Bastaman, K. (2020). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i1.736>

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P
- Hirawan, Z. (2019). Paradoks Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi PUblik*, 10. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/6789/4808>
- Hirawan, Z., Muhtar, E. A., Sumaryana, A., & Adiwisastra, J. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2).
- Jimly Asshidiqie, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta
- Joko Widodo, 2007, *Membangun Birokrasi Kinerja*, Cet. Ke-1, Malang: Bayu Media
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Peirisal, T. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Peruntukan Industri Di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8, 1–18. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIA/article/view/474>



Subarsono, AG. 2005, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

**Dokumen dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendikbud No 15 Tahun 2020 Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan